

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah itu sendiri, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* dalam menjalankan ajaran agama Islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah, namun disamping itu ada faktor lain yang memicu hadirnya sistem dan praktik ekonomi syariah adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan alternatif lain dalam perbankan, setelah banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di bank konvensional akibat dengan adanya sistem bunga yang di terapkan dan dipakai oleh perbankan.

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma (Chapra, 2000). Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *falah* itu terwujud. Etika-etika pokok tersebut adalah: Pertama, keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. Islam memandang bahwa informasi

yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas dan Allah yang lebih mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai apa-apa yang terbaik bagi manusia. Karenanya, apa yang Allah tuntunkan dianggap sebagai sumber rujukan utama. Kedua, keseimbangan baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, keadilan distribusi, maupun keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Ketiga, kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab. Tanggung jawab manusia minimal ada dua hal, yaitu sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi mencapai tujuan ekonomi tersebut (Sudarsono, 2008: 5).

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrument kebijakan moneter yang utama.

Dana merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usaha bagi perusahaan ataupun para pelaku usaha mikro, tentunya menjadi penting keberadaan lembaga keuangan untuk dapat menyediakan

modal bagi pengusaha maupun masyarakat luas. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama.

Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir sampai bulan oktober 2012 cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh $\pm 37\%$ sehingga total asetnya menjadi Rp.174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp.135,58 triliun (40,06 %) dan penghimpunan dana menjadi Rp.134,45 triliun (32,06 %). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara BI dengan industri dalam bentuk IB campaign baik untuk *funding* maupun *financing* telah mampu memperbesar market share perbankan syariah menjadi $\pm 4,3\%$.

Perbankan syariah tetap berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil dan mengoptimalkan pencapaian tersebut. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapatkan perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 80,85 % dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp.135,58 triliun diinvestasikan kedalam aktivitas pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan

memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijaga dalam kisaran stabil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001: 160) :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang masih tetap menjadi tulang punggung keuangan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh bank demi menunjang perannya sebagai tulang punggung keuangan di Indonesia adalah memberikan pembiayaan. Di dalam pemberian pembiayaan, bank tidak hanya bertitik tolak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya

Keberadaan bank merupakan hal yang penting dalam dunia usaha. Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga keuangan bank memang tidak dapat dilepaskan apalagi dalam pengertian pembiayaan. Pihak bank akan menyalurkan pembiayaan berupa pembiayaan investasi dan modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak dunia usaha. Dalam hal inilah pihak bank akan terus mengembangkan kompetensi yang lain dibidang pembiayaan untuk menggalang pertumbuhan pembiayaan yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan.

Sebagaimana diketahui fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi berhubungan langsung dengan dana yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan yang merupakan salah satu tugas pokok bank agar mampu menggerakkan dan menciptakan pembangunan dibidang ekonomi nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil. Sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian nasional.

Sudah menjadi pengetahuan banyak pihak bahwa sektor UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, terlihat dari sumbangannya terhadap PDB nasional yang telah mencapai 56,5 %. Keunggulan UMKM sebagai sektor domestik yang mampu menggerakkan perekonomian nasional ini adalah karena ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM menggunakan sumberdaya dalam negeri baik sumberdaya manusia, bahan

baku, dan peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Selain itu hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global beberapa waktu yang lalu, maka tidak mengherankan lagi jika sektor UMKM selalu menjadi pahlawan bagi perekonomian negeri ini.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat concern terhadap pengembangan sektor riil telah dapat memanfaatkan peluang atas kebutuhan finansial sektor UMKM. Perbankan syariah juga memberikan prioritas penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini terbukti dari data perbankan syariah yang terus mengembangkan sektor riil dengan melakukan pembiayaan kepada sektor riil tersebut sebesar 61,29 % atau Rp.83,09 triliun dari total pembiayaan perbankan syariah (BUS+UUS) disalurkan kepada sektor UMKM. Peningkatan laju pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah kepada sektor UMKM sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada sektor UMKM untuk semakin berkembang, sehingga terus mampu dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, keberadaan perbankan syariah sangat diharapkan untuk terus memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional, khususnya dalam sektor UMKM untuk bisa lebih

perbankan syariah selalu meningkatkan pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijaga kestabilannya.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah tentunya dipengaruhi oleh beberapa variabel yang menyebabkan perbankan syariah menyalurkan pembiayaan terhadap sektor UMKM, baik variabel internal maupun eksternal. Faktor internal dan eksternal perbankan saling berkaitan satu sama lain yang dapat menentukan terhadap pembiayaan yang disalurkan, antara lain DPK, ROA, NPF, dan BOPO yang merupakan faktor internal perbankan yang menitik beratkan pada kinerja pihak manajemen perbankan dalam menganalisis dan mengambil kebijakan pembiayaan terhadap sektor UMKM, sedangkan BI RATE dan INFLASI merupakan faktor eksternal yang memungkinkan mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan pihak perbankan terhadap sektor UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengkaji seberapa besar pengaruh beberapa variabel internal dan eksternal terhadap pembiayaan perbankan syariah pada sektor UMKM pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud meneliti tentang “ **ANALISIS PENGARUH DPK, ROA, NPF, BOPO, BI RATE DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR UMKM PADA BANK**

B. Rumusan Masalah

Perkembangan perbankan syariah secara kualitas terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari segi penghimpunan dana yang terus mengalami peningkatan sehingga perbankan syariah terus melakukan peningkatan pembiayaan kepada nasabah perbankan syariah. Maka berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel DPK, ROA, NPF, BOPO, BI RATE dan INFLASI secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ?
2. Apakah variabel DPK, ROA, NPF, BOPO, BI RATE dan INFLASI secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ?